



## Penerapan Pembangunan yang Partisipatif di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo

Sem Kobak<sup>1</sup>, Dirk Veplun<sup>2</sup>, Kasim Saleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Sosiologi Pascasarjana, Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>2</sup> Program Magister Sosiologi Pascasarjana, Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [sem050690@gmail.com](mailto:sem050690@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Development, Participation, Community, Holuwon, Yahukimo, Papua.*

**How to Cite:**

Sem K., Veplun D., Saleh K. (2023). Penerapan Pembangunan yang Partisipatif di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11 (1): 25-33.

**DOI:**

[10.31957/jeb.v11i1.2798](https://doi.org/10.31957/jeb.v11i1.2798)

### ABSTRACT

*This study aims to see how far the level of village community participation in development programs is being promoted at the Holuwon District level, Yahukimo Regency. Then describe the supporting and inhibiting factors of community participation in the development program. The research method used is descriptive qualitative. The choice of research location was in the Holuwon District, Yahukimo Regency, with consideration of accessibility in conducting research. Data collection techniques used are interviews and observation as well as documentation. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and data verification as well as the conclusion. The results of the study show that the people who participate in the implementation of development mostly want change and regional progress so they actively participate in preparing development plans until the implementation of development is complete. This is because the community is active in discussing development planning, then the community is also involved in providing interactive information. Supporting factors are support from the Government, coordination between agencies, and the will of the community in progressing development. Inhibiting factors are internal factors which include limited knowledge and insight into the community, lack of community will, and external factors which include geographical conditions and low geographic quantity of employees.*

*Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.*

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Pembangunan,  
Partisipasi, Masyarakat,  
Holuwon, Yahukimo,  
Papua.

### **Cara Mengutip:**

Sem K., Veplun D.,  
Saleh K. (2023).  
Penerapan  
Pembangunan yang  
Partisipatif di Distrik  
Holuwon Kabupaten  
Yahukimo. *Jurnal  
Ekologi Birokrasi*, 11 (1):  
25-33.

### **DOI:**

10.31957/jeb.v11i1.2798

## ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat kampung dalam program pembangunan yang digalakkan pada tingkat Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo. Kemudian menguraikan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari adanya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan lokasi riset di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo, dengan pertimbangan aksesibilitas dalam melakukan penelitian. Teknik interview, pengamatan, dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar turut serta dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Hal ini dikarenakan, masyarakat aktif dalam pembahasan perencanaan pembangunan, selanjutnya masyarakat turut aktif dalam pemberian informasi yang bersifat interaktif. Faktor pendukung diantaranya berasal dari pemerintah, lintas instansi aktif berkoordinasi, dan adanya kehendak masyarakat untuk mendukung pembangunan. sementara faktor penghambat mencakup terbatasnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang bersedia turut serta secara maksimal dalam kegiatan pembangunan. selain itu, kendala dari faktor eksternal mencakup jumlah pegawai dan situasi geografis yang sulit.

Hak Cipta© 2023 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

## 1. Pendahuluan

Penerapan pembangunan partisipatif Terjadinya pembangunan tidak lepas dari adanya dukungan masyarakat untuk terlibat aktif dalam prosesnya (Arsyad, 1999). Hal ini dilakukan semata untuk memenuhi kepentingan masyarakat di wilayah pemerintahan tertentu. model pembangunan partisipatif ini dengan demikian memerlukan perencanaan yang merangkul masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. artinya, pembangunan berasal dari akar rumput atau dengan kata lain *bottom up* (Abe, 1994).

Supriatna (2000: 65) menyitir pendapat Korten menjelaskan bahwa pembangunan yang berbasis manusia pada dasarnya harus memenuhi prasyarat agar masyarakat selaku subjek pembangunan untuk terlibat langsung pada setiap tahapannya. Hal ini diperlukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan agenda pembangunan itu sendiri (Bass, dkk, 1995).

Conyers (1991: 154) menambahkan, ada sejumlah alasan dibalik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. pertama, program pembangunan dikatakan berhasil

ketika informasi tentang situasi dan kebutuhan berasal dari masyarakat itu sendiri. kedua, masyarakat cenderung percaya pada program pembangunan selama mereka mengetahui secara rinci agenda maupun kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan representasi nilai-nilai demokrasi (Mulyadi, 2011).

Dalam sebuah upaya pemberdayaan masyarakat tentunya memiliki cara-cara yang logis untuk dilakukan agar dapat mencapai suatu target kesejahteraan yang diharapkan oleh semua kalangan masyarakat. *Kata “kesejahteraan” sendiri dapat menjelaskan bahwa seseorang yang dikatakan “Sejahtera” apabila ia mampu dapat menjalankan atau memanfaatkan peranan dan fungsinya dengan baik tanpa tergantung pada kemampuan orang lain* (Saleh, 2016). Oleh sebab itu, kesuksesan pembangunan juga dapat ditentukan dari beberapa model antara lain penentuan program strategis dengan melibatkan seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam sebuah program pembangunan.

Upaya pembangunan senyatanya bertujuan untuk mencapai perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembanguana karena itu bersifat berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Byant & White, 1982).

Istilah pembangunan sendiri diterjemahkan dari beragam istilah asing (*development, growth, change, modernization, and progress “Raharjo”, 1980*) sehingga terkadang mengandung keracunan pengertian. Salah satu faktor yang memajukan suatu daerah saat ini adalah adanya penerapan pembangunan yang terstruktur sesuai kondisi sosial masyarakat dengan menjaga nilai – nilai budaya setempat demi mencapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat beraktifitas bebas tanpa ada hambatan – hambatan dan paksaan dari pelaku pembangunan itu sendiri.

Seringkali permasalahan sosial muncul karena adanya perbedaan antara harapan dan kondisi ideal sosial budaya masyarakat. realitas ini menjadi celah dorongan untuk menginspirasi berbagai usaha demi mengembangkan perubahan.

Sebagai realitas sosial, baik sebagai kondisi yang disebut sebagai masalah sosial, maupun proses perubahan menuju kondisi yang lebih diharapkan adalah dinamika yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Selama harapan menuju kesejahteraan terus muncul dalam realitas sosial, maka upaya pembangunan akan terus terjadi. Kita bisa melihatnya dari kondisi hari ini yang tentu meningkat dari masa sebelumnya. Dengan asumsi ini, kesenjangan kondisi ideal dengan kondisi sosial yang terus tumbuh menjadi salah satu dasar pentingnya sebuah kajian.

Walaupun demikian, dilihat dari upaya pemecahan masalah pembangunan dalam dinamika status sosial budaya masyarakat di Distrik Holuwon, kajian tentang masalah sosial saja dapat memberikan kesan hanya terfokus pada usaha untuk memahami dan menjelaskan kondisi sosial budaya yang mengikat, tidak secara eksplisit mendorong kajian yang bersifat pemecahan masalahnya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa seluruh kehidupan sosial budaya di setiap kalangan masyarakat di tanah Papua belum mampu mencapai pada tahap pemecahan masalah atau kesejahteraan karena pengaruh sosial budaya masyarakat yang mengikat dan belum siap menerima pembangunan secara cepat. Berdasarkan pemaparan tersebut, tulisan konsen pada pembahasan proses perkembangan dari situasi yang belum sesuai harapan menuju situasi ideal yang diharapkan masyarakat.

Dengan demikian, kajian utama yang akan dilakukan adalah penerapan pembangunan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dilihat dari dinamika sosial budaya masyarakat lokal yang mampu menuju kondisi yang sangat

menguntungkan. Kehidupan sosial budaya masyarakat Distrik Holuwon yang terdiri dari 7 (tujuh) Kampung (Holuwon, Weni, Beimeleruk, Sohonggik, Danggema, Sia dan Sosi) ini memiliki kesamaan adat, budaya, bahasa, Agama dan kebiasaan nilai-nilai persaudaraan namun dilihat dari segi pembangunan sangat bervariasi. Kondisi dan iklim geografis menjadi kendala utama yang sangat besar dalam penerapan program pembangunan di wilayah pegunungan lebih umumnya, dan Distrik Holuwon pada khususnya. Oleh sebab itu, pembangunan ideal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah bahkan masyarakat itu sendiri belum bisa diwujudkan dalam rentang waktu yang singkat karena membutuhkan berbagai macam cara atau strategis agar benar - benar pembangunan infrastruktur yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Dengan adanya pemerintahan kecil yaitu Distrik dan Desa/Kampung, membuat status warga perlahan dapat berubah. Seiring dengan perkembangan, pola hidup masyarakat perlahan terlihat pada suatu peningkatan berkat lancarnya penerbangan perintis (MAF, AMA, SUSI AIR dll.) yang melayani di daerah ini.

Dalam situasi seperti ini peran Gereja sangat menonjol dan berperan aktif dalam mengarahkan pembangunan, pertumbuhan nilai – nilai religius, budaya saling mengasihi kebersamaan, meningkatkan nilai gotong-royong serta saling menghargai satu sama lain di daerah ini, serta memberikan arahan dan motivasi tentang rancangan dan pola pembangunan yang sudah diletakkan nilai-nilai dasar oleh pelaku injil (Misionaris) sehingga dalam melakukan suatu penerapan pembangunan, aturan gereja terus berlaku dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan sosial budaya tanpa merugikan pihak – pihak yang lain. Melalui permasalahan di atas, artikel ini memfokuskan kajiannya pada Penerapan Pembangunan Partisipatif. Hal ini dilakukan agar mengkaji lebih dalam terkait peran pemerintahan Distrik dalam mengolah program pelaksanaan pembangunan kampung melalui dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai penerapan pembangunan partisipasi masyarakat dalam dinamika sosial budaya di tingkat Distrik yang meliputi beberapa kampung yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data, dikelola, dianalisis dan dideskripsikan data yang diperoleh dengan mengedepankan pendekatan kualitatif (Bungin, 2009). Penelitian ini akan dilakukan di Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena penulis sangat memahami betul tentang kondisi masyarakat setempat dengan berbagai aktifitas yang dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan data yang akan diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (Akbar & Setiadi, 2000). Hal ini dengan maksud melibatkan informan dalam wawancara langsung, informan yang dimaksud adalah 7 Kepala Kampung, 1 Kepala Distrik, 1 Pendamping kampungsambil mengamati keadaan umum di lapangan tentang hal-hal yang menyangkut penelitian (Arikunto, 2005). Analisis data dalam penyelidikan ini menggunakan kaedah analisis data kualitatif model interaktif. Proses analisis ini terdiri daripada tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun tahapan analisisnya yakni tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Moleong, 2009)

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### 3.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemerintah daerah terus berupaya membangun wilayahnya dengan pembangunan, termasuk pembangunan desa. Sehingga dalam hal ini, rencana pembangunan merupakan hal yang paling penting. Sebagai langkah strategis, pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak, dari swasta hingga masyarakat untuk kegiatan rencana dan mendukung kerja-kerja pembangunan. hal ini agar kegiatan pembangunan selaras dengan visi misi pemerintah daerah. di tingkat distrik dan kampung, parameter keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka memberikan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal yang paling mendesak adalah dibentuknya perencanaan kebijakan strategis dari tingkat distrik. Perencanaan kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat dalam hal ini pada saat merumuskan dan melembagakan kegiatan pembangunan dengan harapan program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan tetap berpegang pada norma-norma budaya, etika dan moral serta visi dan misi pembangunan, perencanaan kebijakan strategis ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyelaraskan aspirasi dalam merumuskan dan menentukan program dari kegiatan pembangunan agar lebih tepat sasaran, tepat waktu serta tepat lokasi pada saat pelaksanaannya.

Tahapan dalam rencana pembangunan yang partisipatif di kawasan distrik mencakup analisis masalah menuju kegiatan. Hal ini diikuti dengan terbentuknya komunitas lokal yang baru untuk mendukung adanya partisipasi, sehingga kelompok ini nantinya merepresentasikan aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Selain itu, pada setiap tahap, pembangunan distrik diikuti dengan serangkaian tindakan guna mengelola berbagai bentuk dukungan terhadap maupun dari masyarakat.

Distrik Holuwon merupakan salah satu distrik dengan kondisi sosial ekonomi masih perlu dilakukan perbaikan. Adapun dari segi infrastruktur, distrik ini menunjukkan kondisi yang belum masuk kriteria layak. Hal ini berdampak pada kondisi jalan penghubung antar kampung yang rumit. Meski demikian, perencanaan pembangunan distrik ini cenderung menggunakan pendekatan partisipatif yang memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga pembangunan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan pembangunan, distrik Holuwon selaras dengan ciri-ciri yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977). Menurutnya, pembangunan berbasis partisipasi masyarakat bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan. tahapan ini meliputi musyawarah di tingkat distrik. Hasil musyawarah inilah yang kemudian menjadi harapan dilakukannya pembangunan yang efektif. Kemudian, menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi tidak terbatas pada perencanaan saja. Di tingkat lanjut, partisipasi masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini memungkinkan masyarakat benar-benar terlibat dalam seluruh kegiatan pembangunan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga. Bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat Distrik Holuwon dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dalam bentuk tenaga. Masyarakat Distrik Holuwon bergotong-royong dalam membangun dengan sukarela

2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang. Pembangunan tidak terlepas dengan adanya uang, meskipun tidak semua masyarakat memberikan bantuan berupa uang.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk bahan (Material). Partisipasi masyarakat Distrik Holuwon dalam pembangunan juga diwujudkan dalam bentuk material atau bahan. Masyarakat memberikan bantuan material berupa pasir atau batu bahkan banyak masyarakat yang memberikan bantuan makanan ketika proses pembangunan berlangsung. Masyarakat melakukan hal ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun tetapi masyarakat sadar dengan asas gotong-royong untuk mewujudkan pembangunan.
4. Partisipasi Bagi masyarakat Distrik Holuwon yang sebagian besarnya adalah petani, pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan pertanian menyebabkan tumbuhnya partisipasi yang efektif dengan adanya rasa kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat.
5. Partisipasi dalam evaluasi program meliputi penilaian terhadap kelemahan suatu program pembangunan, sekaligus memperbaiki masalah tersebut melalui musyawarah di tingkat distrik. Selain itu, masyarakat Holuwon terlibat aktif dalam kegiatan kerja bakti di tingkat distrik..

Berdasarkan hasil penelitian, program pembangunan dikatakan berhasil selama pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan. hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan distrik..

### **3.2. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat diantaranya dari tiga faktor. Pertama, dari segi keterlibatan aktor dalam pembangunan. kedua, sisi pengetahuan para pelaksana program pembangunan. ketiga, adanya ruang yang memadai untuk pelaksanaan program.

#### **3.2.1. Faktor Pendukung**

Partisipasi Temuan dalam penelitian menunjukkan faktor pendukung sebagai berikut.

- Adanya dukungan pemerintah Yahukimo melalui Badan Perencanaan Daerah dalam rencana pembangunan. pembangunan reguler maupun program baru yang ada dalam Bappeda, diupayakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalamnya.
- Kerjasama lintas instansi. Selain Bappeda, koordinasi lintas instansi bertujuan untuk menyelaraskan program Bappeda dalam jangka panjang. Instansi-instansi tersebut diantaranya dinas-dinas yang berada dalam unsur vertikal, maupun lembaga lain seperti lembaga legislatif, swasta, universitas, dan kelompok di tengah masyarakat.
- Kehendak masyarakat yang menginginkan pembangunan. masyarakat distrik Holuwon memiliki kehendak yang sama dalam mendukung pembangunan di tingkat distrik mulai dari tahap perencanaan seperti ikut serta dalam musrenbang, pelaksanaan kegiatan, maupun evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya dorongan yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga masyarakat memberikan harapan besar untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan di daerahnya. Bagaimanapun, masyarakat lebih memahami konteks lingkungan dan kebutuhannya. Sehingga kegiatan pembangunan yang

berdasar pada kebutuhannya akan memacu rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan program-program pembangunan di tempatnya.

- Faktor tradisi. Masyarakat Holuwon sangat memegang teguh kepercayaan adat istiadat dan pengetahuan tradisionalnya yang menerapkan prinsip kekeluargaan dan saling membantu dalam berbagai kegiatan. Hal ini yang menyebabkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung program pembangunan di distrik.

### 3.2.2. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah penjelasan dari kedua faktor tersebut :

#### 3.2.2.1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian, lemahnya partisipasi sebagian besar masyarakat adalah karena terbatasnya pengetahuan terhadap program pembangunan. selain itu, pendidikan masyarakat yang sebagian hanya sampai jenjang sekolah menengah pertama menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan distrik.

- Ada anggapan bahwa pembangunan hanya menjadi agenda pemerintah. Kesenjangan dan ketergantungan ini menyebabkan program pembangunan mandek dan tidak terlalu dianggap menjadi bagian penting masyarakat.
- Kegiatan perencanaan dan musrenbang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kegiatan formalitas pemerintah yang bersifat tahunan. Anggapan ini menyebabkan kurangnya kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Berbagai masalah yang ditemui dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat apatis dalam musyawarah, meskipun dia datang.
- Terbatasnya waktu musrenbang. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan waktu untuk musyawarah hanya dalam durasi dua jam, sehingga serapan aspirasi dalam kegiatan musyawarah sangat minim.

#### 3.2.2.2. Faktor Eksternal

Kendala eksternal diukur berdasarkan hambatan dari luar masyarakat.

- Keadaan geografis yang kesulitan untuk diakses. Permasalahan utama Yahukimo adalah kawasan luas dan letak geografis yang susah dijangkau meruakan kendala utama yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Jalur-jalur transportasi yang ada saat ini masih mengandalkan jalur udara dan jalur darat dengan tingkat kerumitan yang sama. Sehingga Bappeda kesulitan untuk melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di kabupaten Yahukimo pada umumnya, dan Distrik Holuwon khususnya.
- Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pegawai di tingkat distrik dan kampung. Hal ini menyebabkan kegiatan pembangunan menjadi terhambat dan cenderung mempersulit pemerintah distrik dan kampung dalam kegiatan perencanaan dan sosialisasi pembangunan.

## 4. Kesimpulan

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan dan kemajuan daerah sehingga aktif berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan pembangunan selesai. Faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat meningkat karena semua program yang diakomodir dalam musrenbang sesuai usulan masyarakat Distrik Holuwon, Faktor pendukung pembangunan dalam penelitian ini adalah adanya dukungan pemerintah Yahukimo melalui Badan Perencanaan Daerah dalam rencana pembangunan. Kemudian kehendak masyarakat yang menginginkan pembangunan. Selain itu, masyarakat Holuwon sangat memegang teguh kepercayaan adat istiadat dan pengetahuan tradisionalnya yang menerapkan prinsip kekeluargaan dan saling membantu dalam berbagai kegiatan. Hal ini yang menyebabkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung program pembangunan di distrik.

Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal Ada anggapan bahwa pembangunan hanya menjadi agenda pemerintah. Kegiatan perencanaan dan musrenbang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kegiatan formalitas pemerintah, dan Terbatasnya waktu musrenbang. Kendala eksternal meliputi Keadaan geografis yang kesulitan untuk diakses serta Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pegawai di tingkat distrik dan kampung

### **Daftar Pustaka**

- Abe, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Madiri.
- Akbar, H. U., & Setiady, P. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, I. (1999). *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPEE.
- Bass, S., Dalal C. B., & Pretty, J. (1995). *Participation In Strategies For. Sustainable Development*. IIED London.
- Bungin, M. B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Byant & White, (1982). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Clay E and Schaffer B, 1984., *Room For Manueuvre : The Premise Of Public Policy*.
- Cohen and Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. Cornel. University. New York.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan*. Skripsi Jakarta: PT Rineka Cipta

Moleong, J. L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.

Mulyadi. (2011). *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta Salemba Emba.

Raharjo. (1980) *Law and Society*. Bandung: Angkasa.

Supriatna, T. (2000). *Pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan*, Rineka Cipta. Jakarta.